



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIC INDONESIA**

A

Tambahan Berita Negara R.I Tanggal 9 September 2016 No. 72

Melalui Pengumuman ini maka Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

PENGUMUMAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : Drs.DOSO PURNOMO
- 2. Jabatan : STAF AHLI - BIDANG PEMBANGUNAN
- 3. Alamat Kantor : Jl. KYAI SINGKIL NO. 7, DEMAK
- 4. Tanggal Pelaporan : 13 April 2015

II. DATA HARTA

A. HARTA TIDAK BERGERAK Rp. **449.522.000**
(TANAH DAN BANGUNAN)

- 1. Tanah & Bangunan seluas 338 m2 & 144 m2, di Kota SURAKARTA, yang berasal dari WARISAN , perolehan dari tahun 2010 sampai dengan 2011 NJOP Rp.449.522.000

B. HARTA BERGERAK

a. ALAT TRANSPORTASI Rp. **48.000.000**
DAN MESIN LAINNYA

- 1. Motor, merk YAMAHA V-IXION, tahun pembuatan 2011, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2011 nilai jual Rp.16.000.000
- 2. Motor, merk YAMAHA BYSON, tahun pembuatan 2012, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2012 nilai jual Rp.17.000.000
- 3. Motor, merk SUZUKI SATRIA FU, tahun pembuatan 2012, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan tahun 2012 nilai jual Rp.15.000.000

b. PETERNAKAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, PERTAMBANGAN DAN USAHA LAINNYA Rp.	0
c. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.	18.500.000
1. BENDA BERGERAK LAINNYA, yang berasal dari HASIL SENDIRI, perolehan dari tahun 1997 sampai dengan 2013 dengan nilai jual Rp.18.500.000		
C. SURAT BERTAHAGA Rp.	0
D. GIRO DAN SETARA KAS LAINNYA Rp.	51.797.530
1. Yang berasal dari HASIL SENDIRI dengan nilai Rp.51.797.530		
E. PIUTANG Rp.	0
TOTAL HARTA (II) Rp.	567.819.530
III. HUTANGRp.	0
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II - III) Rp.	567.819.530

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam pengumuman ini sesuai dengan yang dilaporkan oleh Penyelenggara Negara dan tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis

